



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

REAKSI UNI EROPA TERKAIT SANKSI BALASAN
RUSIA ATAS ANEKSASI KRIMEA (2014 – 2016)

Skripsi

Oleh:

Novita Angelia

2013330025

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

REAKSI UNI EROPA TERKAIT SANKSI BALASAN
RUSIA ATAS ANEKSASI KRIMEA (2014 – 2016)

Skripsi

Oleh:

Novita Angelia

2013330025

Pembimbing

Dr. A. Irawan J. H.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Novita Angelia
Nomor Pokok : 2013330025
Judul : Reaksi Uni Eropa terkait Sanksi Balasan Rusia atas
Aneksasi Krimea (2014 – 2016)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 12 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

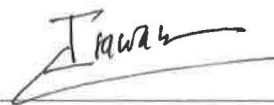
Ketua sidang merangkap anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

: 

Sekretaris

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

Anggota

Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius/Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan Bebas Plagiarisme

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Angelia
NPM : 2013330025
Jurusan/Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu
Hubungan Internasional
Judul : Reaksi Uni Eropa terkait Sanksi Balasan Rusia atas
Aneksasi Krimea (2014 – 2016)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari dikathui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Januari 2017



Novita Angelia

Abstrak

Nama : Novita Angelia
NPM : 2013330025
Judul : Reaksi Uni Eropa terkait Sanksi Balasan Rusia atas Aneksasi Krimea

Kondisi hubungan internasional yang tidak dapat diprediksi telah membuat banyak perubahan-perubahan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Para pembuat kebijakan tidak lagi menggunakan kekuatan militer sebagai upaya untuk melindungi kepentingan ataupun menjaga keamanan nasional, melainkan menggunakan pendekatan-pendekatan non-militer, salah satunya penggunaan sanksi ekonomi. Penelitian ini membahas tentang “Reaksi Uni Eropa terkait Sanksi Balasan Rusia atas Aneksasi Krimea.” Untuk membantu penelitian tersebut, maka penulis menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri, konsepsi aksi dan reaksi, teori Neo-fungsionalisme, *supply – demand*, serta Sanksi Ekonomi milik Murray Scot Tanner, Margaret P. Doxey, dan Johan Galtung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Uni Eropa memiliki kemampuan resistensi terhadap sanksi Rusia melalui reaksi-reaksi yang digunakan untuk menanggulangi kerugian yang ditimbulkan sehingga menyebabkan ketidakefektivitasan pada sanksi balasan tersebut. Pilihan untuk melakukan diversifikasi mitra dagang dengan memperkuat hubungan dagang pada mitra strategis dan memperluas pasar ke Asia digunakan untuk melemahkan pelarangan embargo Rusia. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan keberhasilan UE untuk menggalang opini publik membuktikan bahwa UE secara keseluruhan menanggapi bahwa sanksi balasan Rusia tidak akan memberikan kerugian yang signifikan. Tidak hanya itu, penggunaan CAP dan CFP mampu digunakan untuk mempertahankan kondisi ekonomi di bawah tekanan sanksi.

Kata kunci: sanksi, UE, Rusia, reaksi sanksi

Abstract

Name : Novita Angelia
NPM : 2013330025
Title : The European Union Reaction to Russian Counter-Sanctions
over the Annexation of Crimea (2014 – 2016)

The condition of international relations that cannot be predicted has made a lot of changes as never happened before. Policy makers no longer use military force to protect their interest and national security, but tend to use non-military approach such as economic sanctions. This research objective is to analyze the reaction that have been done by European Union to Russian counter-sanctions over the annexation of Crimea. This research specifically uses the theory of Foreign Policy within the concept of action – reaction, Neo-functionalism theory, *supply – demand*, as well as the Economic Sanctions from Murray Scot Tanner, Margaret P. Doxey, and Johan Galtung.

The researcher uses qualitative method with documentation study as sources of data. This research shows that EU has the ability to resist Russian sanctions through their responses in order to face the losses, and also has undermined the effectiveness of the sanctions itself. Diversification of trading partners by strengthening trade relations within strategic partners and expand its market to Asian has further weakened the Russian ban. Moreover, through public support and rallying public opinion, Russian countersanctions will cause limited overall economic damage to economies within the EU. Thus, CAP and CFP has been successfully carried out to maintain economic conditions under the pressure of sanctions.

Keyword(s): sanctions, European Union, Russia, reaction to sanction

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Skripsi dengan judul dengan judul “Reaksi Uni Eropa terkait Sanksi Balasan Rusia atas Aneksasi Krimea (2014 – 2016)” dibuat dalam rangka memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun diharapkan mampu menyempurnakan penelitian berikutnya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah khasanah ilmu hubungan internasional.

Bandung, 16 Januari 2017

Novita Angelia

Ucapan Terima Kasih

Dalam melakukan penulisan skripsi maupun selama perkuliahan, penulis telah mendapat banyak pengetahuan, bantuan, pengalaman, dan dukungan yang luar biasa. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya yang menguatkan dan melancarkan semua usaha penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
2. Kedua orang tua dan keluarga. Terima kasih atas kepercayaan, dukungan usaha, moral dan materil yang diberikan pada penulis.
3. Dr. A. Irawan J. H. selaku pembimbing yang dengan kesediaannya mau meluangkan waktu dan usaha untuk memberikan masukan serta kritik dalam proses penulisan dan penelitian. Terima kasih atas diskusi – diskusi yang membangun ataupun nasehat yang diberikan, semoga mampu bermanfaat bagi penulis di kehidupan setelah perkuliahan berakhir.
4. Tim penguji sidang skripsi, Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D. dan Giandi Kartasmita, S.IP., M.A., terima kasih atas diskusi yang dilakukan selama sidang berlangsung. Meskipun masih jauh dari sempurna, semoga masukan dan kritik yang diberikan mampu membuat skripsi ini jauh lebih bermanfaat.
5. Persahabatan MKK, terima kasih atas waktu, drama, ataupun kebahagiaan yang diberikan. Semoga dengan berjalannya waktu mampu membuat kita menjadi orang – orang yang bahagia dan siap menghadapi kerasnya hidup.

6. Perempuan – perempuan kuat, HEI Squad All – Star. Terima kasih banyak sudah memberikan kebahagiaan, menjadikan tekanan dan tantangan di kampus berubah menjadi lebih ringan. Kalian bermakna.
7. Medicomrade, khususnya Mupakara dan Magradika. Berkat kalian, penulis dapat merasakan indahnya buku, pesta, dan cinta di kampus tiga. Kehidupan kampus menjadi lebih berwarna karena kalian.
8. Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional (KSMPMI), organisasi pertama bagi penulis di Unpar. Terima kasih atas ilmu – ilmu yang diberikan lewat diskusi dan serangkaian acara yang bermanfaat bagi penulis, baik untuk sisi akademik ataupun untuk mencerahkan jalan pemikiran.
9. Teman satu perjuangan di bawah bimbingan Mas Ir. Selamat, kita sudah berhasil bersama – sama mengakhiri perjuangan. Tetaplah menjadi tangguh dengan rintangan – rintangan ke depan.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan seluruhnya. Teman – teman HI, dosen, seluruh bagian dari FISIP Unpar, terima kasih. Semoga ilmu, pengalaman, pembelajaran, hingga gelar yang diberikan mampu bermanfaat dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penulis.

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	9
1.2.3 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Literatur.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.6.1 Metode Penelitian.....	28
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	28
1.7 Sistematika Pembahasan	29

BAB II

PENDUDUKAN RUSIA DI KRIMEA	30
2.1 Latar Belakang Sejarah Rusia – Krimea	31
2.2 Upaya Rusia untuk Menduduki Krimea.....	35
2.2.1 Revolusi Maidan sebagai Momentum Pemisahan dengan Ukraina.....	35
2.2.2. Langkah-langkah Rusia untuk Mendapatkan Kembali Krimea.....	38

BAB III

PENERAPAN SANKSI UNI EROPA DAN SANKSI BALASAN RUSIA.....	46
3.1 . Uni Eropa sebagai Aktor Regional	47
3.1.1 Kebijakan Pertanian Bersama	53
3.1.2 Kebijakan Perikanan Bersama	54
3.1.3 Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama UE	55
3.2 Hubungan Rusia – Uni Eropa.....	57
3.3 Pemberian Sanksi oleh Uni Eropa	62
3.3.1 Alasan Pemberian Sanksi Ekonomi terhadap Rusia	63
3.3.2 Bentuk-bentuk Sanksi Ekonomi	66
3.4 Sanksi Balasan Rusia terhadap UE	70
3.4.1 Keadaan Rusia di bawah Tekanan Sanksi UE	72
3.4.2 Embargo Makanan	76

BAB IV

REAKSI UNI EROPA TERHADAP SANKSI BALASAN RUSIA	82
4.1 Memperkuat dan Melakukan Diversifikasi Perdagangan dengan Negara Ketiga	83
4.1.1 Memperkuat Perdagangan dengan Mitra Ekonomi Strategis: Amerika Serikat, India, dan Brazil	84
4.1.2 Uni Eropa Memperluas Pasar ke Asia.....	93
4.1.2.1 Korea Selatan.....	95
4.1.2.2 Hong Kong	97
4.2 Menggalang Opini dan Dukungan Masyarakat	100

4.2.1 Menggalang Opini Publik melalui Media	101
4.2.2 Menggalang Dukungan Masyarakat.....	106
4.3 Optimalisasi Penggunaan CAP dan CFP	112
4.3.1 Langkah-langkah Dukungan Pasar (CAP)	114
4.3.2 <i>Public Intervention</i> dan <i>Private Storage Aid</i> (CAP).....	117
4.3.2.1 <i>Public Intervention</i>	117
4.3.2.2 <i>Private Storage Aid</i>	119
4.3.3 Peningkatan Program Promosi (CAP).....	120
4.3.4 Dana Bantuan EMFF (CFP)	124
BAB V	
KESIMPULAN	126
DAFTAR PUSTAKA	130

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Pembagian pilar konstitusi Uni Eropa berdasarkan <i>Treaty of Maastrich</i>	49
Tabel 3.2 <i>Foreign Direct Investment</i> antara Uni Eropa dan Rusia Tahun 2011 – 2013	60
Tabel 3.3 Daftar Produk Agrikultur yang Terkena Embargo oleh Rusia	80
Tabel 4.1 Kepentingan Uni Eropa dan Amerika Serikat terkait Hambatan SPS ..	86
Tabel 4.2 Arus Perdagangan Uni Eropa – India dengan Pembagian Kategori HS 2013 – 2015 (Juta EUR).....	90
Tabel 4.3 Arus Perdagangan Uni Eropa – Brazil dengan Pembagian Kategori HS 2013 – 2015 (Juta EUR).....	92

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Nilai Impor dan Ekspor antara Uni Eropa – Rusia Tahun 2007 – 2013 (EUR).....	59
Grafik 3.2 Impor Rusia berdasarkan Negara Mitra (% dari Total).....	74
Grafik 4.1 Ekspor dan Impor Uni Eropa – Korea Selatan Periode Juli 2010 – Juni 2015 (Miliar EUR).....	96
Grafik 4.2 Ekspor dan Impor Uni Eropa – Hong Kong Periode 2013 – 2015 (EUR)	98

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Pernyataan Komisaris Uni Eropa mengenai Larangan
Ekspor Pertanian Uni Eropa menuju Rusia..... 103

Daftar Singkatan

ASF	<i>African Swine Fever</i>
BSE	<i>Bovine Spongiform Encephalopathy</i>
CAP	<i>Kebijakan Pertanian Bersama (Common Agricultural Policy)</i>
CEPA	<i>Hong Kong-Mainland China Closer Economic Partnership Arrangement</i>
CESDP	<i>Common European Security and Defence Policy</i>
CFP	<i>Kebijakan Perikanan Bersama (Common Fisheries Policy)</i>
CFSP	<i>Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama (Common Foreign and Security Policy)</i>
DPR	<i>Donetsk People's Republic</i>
ECSC	<i>Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (European Coals Steel Community)</i>
ESDP	<i>European Security and Defence Policy</i>
EMFF	<i>Dana Kelautan dan Perikanan Eropa (European Maritime and Fisheries Fund)</i>
ESI	<i>European Structural and Investment</i>
EUR	<i>Euro</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
G8	<i>Group of Eight</i>
HKSARG	<i>Structured Dialogue between the EU and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region</i>
HRVP	<i>High Representative and Vice-President</i>
IMS	<i>Inter State Conference of Milk Shipments</i>
JHA	<i>Peradilan dan Dalam Negeri (Justice and Home Affairs)</i>
MRL	<i>Maximum-Residue Limit</i>
OIE	<i>Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (World Organisation for Animal Health)</i>
PCA	<i>Partnership and Cooperation Agreement</i>
ROC	<i>Russian Orthodox Church</i>
SPS	<i>Tindakan-tindakan Sanitari dan Fitosanitari (Sanitary and Phytosanitary Measures)</i>
TEU	<i>Treaty on European Union</i>
TFEU	<i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>
TTIP	<i>Transatlantic Trade and Investment Partnership</i>
UE	<i>Uni Eropa (European Union)</i>
WTO	<i>World Trade Organizations</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup damai secara berdampingan sulit untuk diwujudkan dalam keadaan dunia saat ini, Lentner menyatakan bahwa '*world is the environment and the world is immensely complex*'.¹ Sehingga tidak dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat internasional dewasa ini dihadapkan pada situasi yang penuh dengan dinamika konflik di berbagai kawasan dunia. Berbagai aspek tertentu telah menjadi alasan dibalik berbagai pertikaian yang terjadi, seperti aspek ekonomi, keamanan, etnis, maupun kemanusiaan.

Dalam menghadapi situasi eksternal yang mengancam kepentingan nasional maupun kehidupan masyarakat di dalamnya, maka pemerintah perlu memutuskan apakah mereka akan mereaksi, serta bentuk reaksi seperti apa yang akan mereka ambil.² Terdapat beberapa pilihan keputusan yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mereaksi situasi tersebut, misalnya dengan memilih untuk menggunakan sanksi.

Tujuan serta alasan dari kelompok-kelompok kepentingan di balik pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi akan berbeda. Namun, Kaempfer dan Lowenberg mencoba untuk memberikan identifikasi mengenai

¹ Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach* (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1974), 51.

² Margaret P. Doxey, "Reflection on the Sanctions Decade and Beyond," *International Journal*, Vol. 64, No. 2 (2009): 539.

tujuan dan alasan dari pengenaan sanksi, yaitu (1) alasan landasan moral yang tinggi, (2) memberi hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan, atau (3) mencoba untuk mengubah suatu kebijakan.³

Pada umumnya, sanksi yang dijatuhkan pada suatu negara mencakup tiga tujuan tersebut, khususnya pada penekanan bahwa suatu negara dianggap telah membahayakan perdamaian dan keamanan internasional melalui pelanggaran hukum internasional, perjanjian atau kesepakatan bercangkupan internasional, alasan kemanusiaan atau lainnya. Hukum internasional merupakan pijakan dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa-bernegara yang harus dijalankan sesuai dengan itikad baik, sehingga suatu negara berhak untuk mendapat reaksi apabila telah melakukan suatu perilaku yang bertentangan dengan dasar tersebut.

Sebagai langkah ‘damai’, sanksi lebih banyak digunakan untuk menegakkan perdamaian oleh aktor-aktor internasional. Seperti yang ditunjukkan dalam *National Conference of Catholic Bishops* bahwa sanksi telah menawarkan pilihan alternatif dari penggunaan non-militer, daripada penggunaan perang atau sikap ketidakpedulian, pada saat agresi atau ketidakadilan terjadi.⁴

PBB, melalui DK PBB, merupakan salah satu aktor yang telah secara efektif menggunakan sanksi sebagai tindakan untuk meminta

³ William H. Kaempfer dan Anton D. Lowenberg, “Targeted Sanctions: Motivating Policy Change,” *Harvard International Review*, Vol 29, No. 3 (2007): 2.

⁴ National Conference of Catholic Bishops, “The Harvest of Justice Is Sown in Peace: A Reflection of the National Conference of Bishops on the Tenth Anniversary of *The Challenge to Peace*,” (Washington, DC: United States Catholic Conference, 1994).

pertanggungjawaban pada negara yang telah melakukan agresi atau mengancam perdamaian.⁵ Sejak 1966 DK PBB telah memberlakukan 26 sanksi terkait rezim pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB VII Piagam PBB.⁶

Selain digunakan secara multilateral melalui organisasi internasional maupun regional, sanksi juga dapat dikenakan secara unilateral, yaitu satu atau beberapa negara sepakat untuk memberikan sanksi secara bersama. Bukan hanya berdasarkan pada pelanggaran hukum internasional, perjanjian bilateral dan multilateral yang telah disepakati bersama yang telah dilanggar suatu negara mampu menjadi alasan dibalik penerapan sebuah sanksi. Secara implisit, sanksi mampu digunakan sebuah negara untuk memberikan tekanan atas tindakan yang memiliki potensi untuk mengancam pencapaian kepentingan nasional.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Forster yang menyatakan bahwa sanksi dapat dilatarbelakangi oleh keinginan politik, dan disahkan berdasarkan alasan moral.⁷ Telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan sanksi antara lain adalah untuk mengubah kebijakan negara lain yang dianggap menyimpang, dengan arti luas bahwa negara pengirim sanksi ingin mengamankan kebijakan negara lain yang dianggap memiliki potensi untuk mengganggu kepentingan nasionalnya. Apabila tidak mendapat reaksi penolakan, maka akan

⁵ Benedetto Conforti, *The Law and Practice of the United Nations* (Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2005), 8.

⁶ UNSC, *Sanctions*, <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information>, diakses pada 2 Desember 2016.

⁷ W. Arnold Forster, "Sanctions," *Journal of the British Institute of International Affairs*, Vol. 5, No. 1 (1926): 3.

menimbulkan dampak yang semakin menyebar, sehingga kebijakan tersebut tidak lagi menjadi potensi ancaman, tetapi telah meningkat menjadi sebuah ancaman.

Tidak berhenti sampai di situ, interaksi kedua pihak akan terus berjalan dan berupaya untuk tetap mengontrol keadaan domestik. Sebagai negara berdaulat, maka negara yang menjadi target sanksi akan tetap berusaha mencari tindakan alternatif untuk tetap meraih kepentingan yang terhambat oleh pengenaan sanksi. Terlebih bahwa pengenaan sanksi akan menyebabkan kerugian yang lebih besar pada masyarakat dalam sebuah negara, karena mereka adalah pihak yang mengalami dampak secara langsung dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga para pembuat keputusan tetap harus bertindak untuk mencegah perluasan dampak dari pengenaan sanksi.⁸

Hal ini menjadikan sanksi sebagai komponen penting dalam sebuah kebijakan luar negeri, tentang bagaimana mereka mampu menghadirkan alasan moral di balik pencapaian kepentingan-kepentingan nasional serta tindakan alternatif yang dilakukan dengan tujuan untuk tetap bertahan di bawah tekanan sanksi. Sehingga aksi – reaksi yang hadir akibat pengenaan sanksi menjadi isu penting dalam permasalahan hubungan antarnegara.

⁸ David A. Baldwin, "The Sanctions Debate and the Logic of Choice," *International Security*, Vol. 24, No. 3 (1999): 92.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Penggunaan sanksi dalam hubungan internasional didominasi oleh penggunaan sanksi ekonomi dibanding dengan jenis sanksi lainnya. Hal ini didasari bahwa sanksi ekonomi menjadi reaksi yang sebanding dengan tantangan yang dihadapi atas perilaku atau tindakan negara lain, karena akibat yang ditimbulkan dari sanksi ekonomi mampu mengganggu perdagangan internasional serta pergerakan arus keuangan.

Perlu diketahui bahwa tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi tekanan sektor ekonomi. Terlebih penelitian menunjukkan bahwa sanksi ekonomi memiliki potensi keberhasilan lebih tinggi bila dijatuhkan terhadap negara mantan aliansi dan mitra dagang daripada negara lawan (*adversaries*).⁹ Di mana seiring dengan keberhasilan yang didapat dari pengenaan sanksi, terdapat pula masyarakat yang harus menanggung kerugian signifikan akibat peperangan kepentingan.

Sanksi ekonomi yang dikenakan oleh negara-negara dengan kapasitas dan kemampuan yang sama besarnya memang jarang dilakukan. Namun, ketika hal itu terjadi, tetap akan mengganggu kehidupan masyarakat secara luas di dalamnya, karena semua sanksi ekonomi akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi

⁹ Barbara Oegg dan Kimberley Elliott, "Russia and the Effectiveness of Economic Sanctions between Big Players," *VOX CEPR's Policy Portal*, 8 Oktober 2008, <http://voxeu.org/article/futility-using-economic-sanctions-against-russia>, diakses pada 30 November 2016.

nasional. Serta cenderung menerima kerugian yang sama besar pada kedua pihak, karena hubungan yang terjalin telah melahirkan sebuah situasi saling ketergantungan. Ketika permasalahan yang terjadi dalam dunia internasional menjadi semakin kompleks, tidak terdapat lagi jaminan bahwa sanksi tidak akan terjadi antara dua pihak dengan kekuatan yang sebanding serta hubungan ekonomi yang saling ketergantungan.

Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, aneksasi yang terjadi di Krimea telah mendorong terbentuknya ekuilibrium baru dengan dua pilihan cara; menyeimbangkan kekuatan Rusia melalui penanggulangan yang kuat, atau mengakomodasi bersama kepentingan bersama dalam dialog Timur – Barat.¹⁰ Negara anggota Uni Eropa (UE) sepakat bahwa ketika keamanan Eropa telah terancam, maka mereka akan mengesampingkan urusan bisnis. Dengan tidak mempertaruhkan hubungan ekonomi yang saling ketergantungan antara UE – Rusia, mereka memilih untuk tidak menggunakan strategi konfrontasi terbuka.

Penjatuhan sanksi dipilih sebagai cara untuk memulihkan hubungan keamanan dengan Rusia, dengan tujuan strategis untuk menjamin bahwa negara-negara di dalam benua Eropa memiliki kebebasan untuk memilih asosiasi ekonomi dan politik mereka, serta menghindari usaha Rusia untuk melakukan aneksasi wilayah lebih

¹⁰ Henrik Boesen Lindbo Larsen, “Great Power Politics and the Ukrainian Crises: NATO, EU and Russia after 2014,” *Danish Institute for International Studies Report 2014: 18* (2014): 7.

banyak lagi di Ukraina Timur. UE ingin menjamin bahwa mereka akan menjamin keamanan batas teritorial Eropa dan tidak akan memberi celah bagi Rusia untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari.¹¹

Bertepatan pada situasi melemahnya harga minyak dunia, sanksi UE telah semakin membuat kerugian bagi perekonomian Rusia.¹² Namun, Rusia tidak akan begitu saja menyerahkan semua usaha dan mengubah tindakannya dengan kembali menyerahkan Krimea di bawah kedaulatan Ukraina. Hal ini terjadi karena dengan mendapatkan Krimea, Rusia mampu menambah tingkat *power*, khususnya dalam bidang militer, serta meningkatkan citra bahwa Rusia telah kembali menjadi negara yang tidak diragukan lagi kemampuannya.

Oleh karena itu, sebagai reaksi terhadap sanksi UE, Rusia memutuskan untuk melakukan sanksi balasan dengan melakukan embargo pada produk-produk tertentu asal UE. Sanksi balasan digunakan sebagai instrumen untuk menekan posisi UE, khususnya atas kekhawatiran bahwa UE akan semakin melebarkan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur dengan memanfaatkan situasi penerapan sanksi. Di mana kondisi tersebut mampu membahayakan posisi Rusia akibat aneksasi yang dianggap ilegal dan tidak mengindahkan hukum internasional, sehingga muncul persepsi bahwa Rusia tidak lebih baik daripada UE. Dengan pilihan untuk menjatuhkan sanksi balasan,

¹¹ Ibid., 31.

¹² Alec Luhn, "Russia's GDP Falls 3.7% as Sanctions and Low Oil Price Take Effect," *The Guardian*, 21 Januari 2016, <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/25/russias-gdp-falls-37-as-sanctions-and-low-oil-price-take-effect>, diakses pada 18 November 2016.

setidaknya Rusia telah memposisikan UE untuk berada pada posisi yang sama dengannya.

Sebagai negara yang tetap mengacu pada sistem pemerintahan yang otoriter, Rusia menjadikan sanksi sebagai keadaan untuk semakin mendulang popularitas Putin.¹³ Fenomena ini mampu terjadi karena Presiden memiliki otoritas tertinggi, serta segala langkah yang diambil untuk mereaksi sanksi UE akan disetujui oleh masyarakatnya. Dalih yang digunakan dalam mendapatkan dukungan masyarakat adalah Rusia akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui industri-industri domestik.

Sebaliknya, keadaan tersebut tidak dapat dengan mudah didapatkan oleh UE yang dihadapkan dengan sanksi balasan Rusia. UE yang terdiri atas negara-negara anggota harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat di dalamnya untuk menghadapi dampak kerugian yang telah mengganggu keadaan pasar. Posisi yang berbeda dari Rusia ini juga disebabkan karena sistem pemerintahan demokratis sehingga menuntut para pembuat keputusan mampu mengeluarkan langkah-langkah konkrit yang secara efektif mampu mencegah kerugian pada masyarakat, dan tentang bagaimana UE membuat masyarakatnya mampu terlibat aktif untuk mendukung keputusan UE.

¹³ Anastasia Kazun, "Rally-Around-the-Flag and the Media: Case of Economic Sanctions in Russia," *National Research University Higher School of Economics* (2016): 9.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan berfokus pada reaksi-reaksi yang diberikan UE setelah mengalami gangguan pasar akibat sanksi balasan Rusia. Penulis akan membatasi ruang waktu penelitian yaitu pada tahun 2014 – 2016, selama kurun waktu tersebut penulis akan membahas mengenai aneksasi Krimea, penerapan sanksi – sanksi balasan antara UE dan Rusia, dan bagaimana reaksi – reaksi yang diambil UE atas sanksi balasan serta pengaplikasian pada teori yang menjelaskan bagaimana reaksi target mampu mempengaruhi efektivitas sanksi dan menanggulangi kerugian yang ditimbulkan akibat sanksi.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dilakukan dengan pembatasan masalah, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini mengenai **“bagaimana reaksi UE terkait sanksi balasan yang dilakukan oleh Rusia atas aneksasi Krimea periode 2014 – 2016?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana UE melakukan reaksi sebagai upaya untuk menstabilkan pasar dan mempertahankan citranya. Selain itu, sebagai akibat dari

kehilangan pasar ekspor strategis, Penulis ingin memberikan gambaran bagaimana UE memilih untuk memperkuat hubungan dagang dengan mitra dagang selain Rusia, serta memperluas pasarnya menuju Asia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan informasi dan wawasan pada pembaca, terutama peminat studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai sanksi ekonomi sebagai sebuah keluaran dari kebijakan luar negeri untuk mereaksi tindakan suatu negara dan bagaimana reaksi yang diberikan negara target dengan tujuan untuk tetap menstabilkan keadaan domestik
2. Untuk memberikan referensi tambahan dalam memahami hubungan negara-negara, khususnya hubungan Rusia dan Uni Eropa dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya.

1.4 Kajian Literatur

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian karya Elena V. McHlean dan Taehee Whang, Susan Hannah Allen, dan Johan Galtung yang memberikan pemaparan mengenai efektivitas pengenaan sanksi yang dilihat dari berbagai macam faktor, seperti bagaimana hubungan dagang kedua pihak pengirim dan target sanksi, sistem politik domestik target, dan langkah-langkah reaksi yang mampu dilakukan oleh negara target untuk menanggulangi kerugian.

Elena V. McLean dan Taehee Whang dalam *Friends or Foes? Major Trading Partners and the Success of Economic Sanctions* berfokus pada peran

dari mitra dagang utama negara target, di mana tindakan mereka dapat mempengaruhi probabilitas keberhasilan sanksi. Sanksi memiliki potensi untuk tidak berhasil apabila mitra dagang terbesar negara target meningkatkan perdagangan mereka setelah sanksi dijatuhkan. Temuan lain dalam penelitian adalah bahwa kerjasama internasional tidak lagi menjadi signifikasi penting jika sanksi diinisiasi oleh negara mitra utama negara target karena sanksi tersebut memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi.¹⁴

Susan Hannah Allen dalam *The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure* mencoba untuk mengemukakan faktor lain untuk menentukan kegagalan dan keberhasilan dari sanksi. Dengan menggunakan politik domestik, Allen ingin menunjukkan bahwa struktur politik mampu mempengaruhi bagaimana cara suatu negara menanggapi tekanan ekonomi, dengan hasil bahwa negara target dengan sistem demokratis telah memperpendek durasi penerapan sanksi.¹⁵

Masyarakat negara demokratis memiliki kemampuan untuk melawan kerugian politik pemimpin mereka atas kebijakan yang dianggap gagal atau *unpopular*. Sebaliknya, masyarakat di bawah kepemimpinan otoriter hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahannya. Dalam menghadapi tekanan sanksi, negara demokrasi dipaksa untuk melakukan tindakan cepat serta responsif terhadap masyarakatnya. Sedangkan para pemimpin otoriter memiliki lebih sedikit intensif untuk

¹⁴ Elena V. McLean dan Taehee Whang, "Friends or Foes? Major Trading Partners and the Success of Economic Sanctions," *International Studies Quarterly*, 54 (2010): 135.

¹⁵ Susan Hannah Allen, "The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure," *International Interactions*, 31 (2005): 429.

mengakui sanksi tersebut, dan tidak dapat melakukan reaksi dalam waktu yang dekat. Mereka bersedia untuk berdiri teguh dalam menghadapi tekanan sanksi tanpa batas.

Terakhir, Johan Galtung dalam *On the Effect of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia* menganalisa bahwa untuk mengukur keberhasilan sanksi, mampu dilihat dari reaksi-reaksi yang dilakukan negara target untuk menanggulangi kerugian yang didapat. Adapun langkah tersebut adalah (1) target memilih untuk beradaptasi dengan keadaan, (2) melakukan restrukturisasi ekonomi nasional, dan (3) membuka dan menjalin hubungan dagang dengan pihak ketiga.¹⁶

Dari ketiga literatur yang telah dikaji oleh penulis, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan fokus pembahasan dengan penelitian penulis. Literatur pertama karya Elena V. McLean dan Taehee Whang memberikan pemaparan mengenai keberhasilan sanksi ekonomi apabila dikenakan oleh negara mitra dagang utama target, sementara Susan Hannah Allen berfokus pada penenaan sanksi bila dikenakan pada negara demokratis dan otoriter, dan Galtung yang melihat dari reaksi-reaksi yang mampu dilakukan negara target untuk melemahkan kerugian sanksi. Ketiga literatur telah memberikan informasi mengenai keberhasilan penenaan sanksi yang dilihat dari faktor-faktor yang berbeda, sehingga memiliki keterkaitan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis.

¹⁶ Johan Galtung, "On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia," *World Politics*, Vol. 19, Issue 3 (1967): 387.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu.¹⁷ Penggunaan kerangka pemikiran dapat mempermudah peneliti menganalisa suatu fenomena atau masalah dan membantu menghasilkan jawaban yang sesuai. Untuk menganalisa reaksi UE terkait sanksi balasan Rusia atas aneksasi Krimea, penulis akan menggunakan teori kebijakan luar negeri yang mencakup konsep aksi-reaksi, teori neo-fungsionalisme, *supply – demand*, dan teori sanksi ekonomi.

Hubungan Internasional adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat suatu negara dalam hubungannya dengan masyarakat di luar batas negaranya dan memiliki sifat yang saling mempengaruhi.¹⁸ Tujuan Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor negara dan non-negara di dalam arena transaksi internasional, yang dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional.¹⁹

Dalam hubungan bernegara, politik luar negeri merupakan sebuah formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.²⁰

¹⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006), 84.

¹⁸ Trygve Mathisen, *Methodology in the Study of International Relations* (Oslo: Oslo University Press, 1963), 74.

¹⁹ A.A. Banyu Perwita dan Y. Mochammad Tani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4 – 5.

²⁰ *Ibid.*, 47.

Politik luar negeri suatu negara telah menghasilkan suatu kebijakan yang diterapkan dalam hubungan dengan negara lain atau organisasi-organisasi internasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan internasional dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional. Fokus utama dalam pengkajian politik luar negeri adalah aktor, tetapi tetap tidak dapat dipisahkan dari pengkajian lingkungan mengingat definisi kebijakan luar negeri sebagai interaksi aktor dengan lingkungannya.²¹

Kebijakan luar negeri merupakan seperangkat kajian tentang bagaimana perilaku suatu negara membuat kebijakan sehingga melibatkan studi politik internasional dan domestik yang menyangkut hubungan internasional dan kebijakan publik.²² Howard H. Lentner memberikan klasifikasi bahwa dalam melakukan perumusan kebijakan luar negeri, maka sebuah negara perlu memperhatikan sumber atau determinan-determinan utama yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu determinan luar negeri dan determinan domestik.

Determinan luar negeri mengacu kepada keadaan sistem internasional dan situasi pada suatu waktu tertentu.²³ Lentner mendefinisikan sistem internasional sebagai sebuah pola interaksi diantara negara-negara yang ter-atau-dibentuk oleh struktur interaksi di antara pelaku-pelaku yang memiliki power paling kuat (*most powerful actors*). Sedangkan situasi merupakan sebuah pola-pola interaksi yang tidak tercakup atau mencakup keseluruhan sistem

²¹ Lentner, *Foreign Policy Analysis*, 6.

²² M. Clarke, "The Foreign Policy System: A Framework for Analysis," dalam *Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach*, ed. M. Clarke dan B. White (Cheltenham: Edward Elgar, 1998), 27 – 59.

²³ Lentner, *Foreign Policy Analysis*, 105.

internasional, seperti misalnya pola interaksi aktor-aktor di sebuah kawasan tertentu.

Sedangkan untuk mendefinisikan determinan domestik, Lentner menyatakan bahwa determinan tersebut sebagai keadaan pada kondisi dalam negeri sebuah negara yang terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan waktu untuk berubah, yaitu

1. determinan yang paling stabil; seperti ukuran dan lokasi geografis, iklim, jumlah penduduk serta sumber lainnya yang terdapat di suatu negara. Perubahan yang terjadi pada determinan ini sangat lambat sehingga kecil kemungkinannya terjadi perubahan secara mendadak,
2. determinan yang cukup stabil (moderat); termasuk di dalamnya adalah budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik, nilai-nilai yang dianut (*common values*), dan proses politik yang berlaku secara umum di suatu negara.
3. determinan yang tidak stabil; meliputi perubahan individu, persepsi, tujuan, ketakutan, dan sebagainya yang datangnya dari para pembuat keputusan yang berwenang, pergulatan antara koalisi yang berkompetisi merebut kekuasaan, perkembangan struktur baru dari pemerintahan dan sebagainya.²⁴

Richard Synder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin melihat bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dapat disajikan dalam

²⁴ Lentner, *Foreign Policy Analysis*, 135 – 136.

sebuah konsepsi *tindakan* dan *reaksi* antara entitas politik.²⁵ Sehingga setiap kebijakan luar negeri suatu negara akan bersandar pada cara para pembuat keputusan dalam mendefinisikan situasi dan bagaimana mereka menghasilkan penyelesaian masalah di dalam aksi-reaksi-interaksi.

Sebuah *tindakan* (*action*) dapat timbul dari kebutuhan untuk membangun, memelihara, dan untuk mengatur kepuasan dalam interaksi yang terjadi antara negara, dan untuk mengerahkan kontrol atas interaksi yang tidak diinginkan atau tidak dapat dihindari.²⁶ Sebuah negara mampu melakukan tindakan yang terencana (*planful*), dalam arti bahwa tindakan tersebut merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk mencegah atau meminimalkan pencapaian tujuan yang tidak kompatibel atau mengancam negara lain.

Reaksi adalah sebuah upaya yang dilakukan negara dalam menanggapi *tindakan* negara lain, di mana *reaksi* yang dilakukan dapat merupakan sebuah aksi yang tidak menentang tujuan nasionalnya.²⁷ *Reaksi* dari negara mungkin dapat dilakukan dalam bentuk *inaction* atau mungkin dalam bentuk tindakan yang tidak berhubungan dengan tujuan dari negara penindak.

Sedangkan bagi Holsti, reaksi merupakan sebuah kesiapan suatu negara menerima rangsangan, di mana reaksi mengacu pada lima klasifikasi yaitu, (1) *to accommodate* (mengakomodasi), *to ignore* (mengacuhkan pesan-pesan yang

²⁵ Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin, "The Decision-Making Approach to the Study of International Politics," dalam *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, ed. James N. Rosenau (New York: The Free Press, 1969), 199.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 200.

datang dari pihak lawan), *to procrastinate* (menangguhkan suatu masalah), *to bargain* (melakukan negosiasi serta berusaha mengubah aksi atau tujuan negara lain), dan *to resist* (menentang aksi).²⁸

Kebijakan luar negeri tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, tetapi dengan semakin meluasnya aktor dalam hubungan internasional, entitas regional saat ini juga mampu menunjukkan kemampuannya dalam membuat kebijakan luar negeri yang mengedepankan kepentingan bersama negara di dalamnya. Dalam keadaan tersebut, regionalisme muncul sebagai bentuk saling ketergantungan dalam suatu kawasan.²⁹

Fungsionalisme berusaha untuk menjadi jalan keluar bagi negara-negara untuk secara bersama menangani isu-isu yang melampaui batas-batas teritorial.³⁰ Namun, teori tersebut dikembangkan kembali oleh Ernst Haas dengan Neo-fungsionalisme yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus mendapat sejumlah kedaulatan dari pemerintah jika menginginkan institusi tersebut menjadi efektif.³¹ Selain itu, Ben Rosamund mencoba untuk menyederhanakan argumen dasar dari teori ini, yaitu dua atau lebih negara setuju untuk bekerjasama demi integrasi dalam sektor ekonomi.³²

Dengan penekanan pada pentingnya peran non – negara sebagai bagian dari konstelasi politik, tetapi tidak menghindarkan kehadiran entitas negara

²⁸ K.J. Holsti, *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis* (Jakarta: Erlangga, 1988), 117.

²⁹ Louis Fawcett dan Andrew Hurrell, *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order* (New York: Oxford University Press Inc., 1995), 38.

³⁰ Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts* (London: Routledge, 2002), 116.

³¹ *Ibid.*, 117.

³² Ben Rosamund, *Theories of European Integration* (New York: St. Martin's Press, 2000), 58 – 59.

anggota yang tetap memiliki peran penting dalam proses tersebut. Haas berpendapat bahwa organisasi internasional apabila dikelola dan didesain dengan baik maka akan mampu melahirkan sebuah ‘efek melimpah’ (*spillover effect*) bagi kerjasama di sektor – sektor lain, selain ekonomi, yang berujung pada integrasi internasional.³³

Aktivitas – aktivitas yang bersifat integratif atau disintegratif dari organisasi regional perlu dikelola dalam sebuah kerangka pengaturan regional. Hasil dari pengaturan tersebut kemudian dapat memunculkan peningkatan integrasi atau, sebaliknya, disintegrasi di antara negara – negara.³⁴ Apabila negara telah menyetujui suatu keputusan pada tingkat regional, maka mereka harus menerima konsekuensi dari pelaksanaan keputusan tersebut. Sehingga negara akan memiliki kecenderungan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap strategi yang dilakukan.

Kehadiran institusi supranasional mampu menghindari konflik antar negara anggotanya akibat kesepakatan yang dibuat bersifat memaksa harus dilaksanakan oleh seluruh negara anggota. Dalam sebuah keadaan supranasional tersebut maka akan membuat pemerintah nasional mempertahankan kontrol pada setiap aktivitas yang dijalankan dan menjaga loyalitas total yang sudah diberikan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, Neo-fungsionalisme melihat bahwa keefektifan kebijakan yang dibuat akan bergantung pada kemampuan para pembuat keputusan dan ahli teknis

³³ Ernst Haas, “Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization,” *Haas Literaly Estate* (2008): 11.

³⁴ Ernst B. Haas, “The Study of Regional Integration: Reflection on the Joy and Anguish of Pretheorizing,” *International Organization*, Vol. 24, No. 4 (1970): 611 – 612.

(*technical experts*) untuk menerapkan pengetahuan konsensual atas solusi yang dikeluarkan untuk menghadapi permasalahan bersama.³⁵

Hubungan kerjasama antarnegara akan banyak bersinggungan dengan kegiatan perdagangan, tetapi dengan mengedepankan pentingnya stabilitas keadaan ekonomi nasional. Hal itu memiliki keterkaitan dengan model keseimbangan ekonomi milik Mundell – Flemming, yang digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ekonomi dengan tiga komponen utama, yaitu keseimbangan pasar barang dan jasa, keseimbangan pasar uang – modal, dan keseimbangan ekonomi.³⁶

Untuk memahami situasi tersebut maka dibutuhkan pemahaman mengenai teori *supply – demand*. *Supply* dalam ekonomi dapat dipahami sebagai penawaran yang diberikan oleh produsen atas suatu barang atau jasa sebagaimana keinginan dan kemampuan dari produsen.³⁷ Sedangkan *demand* hadir untuk memperlihatkan posisi dari pihak pembeli atau konsumen, di mana *demand* merupakan sebuah keinginan dan kemampuan pembeli atau konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dalam jumlah tertentu.³⁸

Supply dan *demand* berperan penting dalam penentuan harga jual barang di pasar, di mana harga barang tersebut akan hadir dari nilai kesimbangan kedua faktor atau yang disebut dengan *equilibrium*. Tujuan dari *equilibrium* adalah untuk melihat harga dan kuantitas keseimbangan yang menguntungkan

³⁵ Ibid., 118.

³⁶ Pratama Rahardja dan Mandala Manurun, “Pengantar Teori Makro Ekonomi,” *Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2008.

³⁷ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics: Sixth Edition* (Ohio: South – Western Cengage Learning, 2012), 73.

³⁸ Ibid., 67.

kedua belah pihak baik produsen maupun konsumen.³⁹ Sehingga negara daulat harus tetap menjaga keseimbangan ekonomi domestik, yang dapat dilakukan dengan mengamankan posisi *supply – demand* dalam keadaan apapun, meskipun berada di bawah tekanan penerapan sanksi ekonomi.

Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya. James M. Lindsay berpendapat bahwa negara memiliki satu atau lebih dari lima tujuan ketika menerapkan sanksi ekonomi, yaitu kepatuhan (*compliance*), penumbangan (*subversion*), pencegahan (*deterrence*), simbolisme internasional, atau simbolisme domestik.⁴⁰

Sejalan dengan Lindsay, Murray Scot Tanner juga percaya bahwa sanksi seringkali tidak berhasil untuk mengubah perilaku negara lain yang dianggap merugikan. Hal ini didasari pada reaksi atau respon yang diberikan kepada negara target (negara tujuan sanksi ekonomi) atas penerapan sanksi oleh negara pengirim (negara yang mengimplementasikan sanksi ekonomi), sehingga mempengaruhi efektivitas dari penerapan sanksi tersebut. Untuk menanggapi penjatuhan sanksi, Tanner mencoba untuk memberikan klasifikasi tentang faktor-faktor yang mampu mempengaruhi efektivitas sanksi ekonomi,

³⁹ Ibid., 77.

⁴⁰ James M. Lindsay, "Trade Sanctions As Policy Instruments: A Re-Examination," *International Studies Quarterly*, Vol. 30, Issue 2 (1986): 155 – 156.

yaitu reaksi-reaksi yang diberikan berdasarkan pada faktor ekonomi dan politik.⁴¹

Di mulai dengan pemaparan faktor ekonomi, Tanner menyatakan setidaknya terdapat empat sub-faktor yang mampu mempengaruhi efektivitas sanksi yakni, pertama, sanksi akan berlaku efektif bilamana sanksi yang merugikan hubungan dagang kedua pihak mampu mempengaruhi pendapatan ekonomi negara target, dengan FDI dan total perdagangan luar negeri sebagai tolak ukur. Subfaktor kedua memiliki keterkaitan dengan subfaktor pertama, yaitu apabila kerugian yang terjadi akibat sanksi telah mengancam total persentase pendapatan negara target.

Subfaktor ketiga yang dikemukakan oleh Tanner adalah strategi dan substitusi pada produk atau kegiatan ekonomi yang dilakukan negara target, di mana target mampu melakukan strategi untuk menyesuaikan keadaan domestik dengan mencari produk dan sumber pengganti, serta pasar alternatif untuk penjualan barang. Berhubungan dengan subfaktor ketiga, subfaktor terakhir yang dipaparkan oleh Tanner adalah kapasitas negara untuk memonitor dan menegakkan sanksi ekonomi pada negara target. Sanksi ekonomi sering kali gagal karena kelalaian pengawasan, di mana negara target ternyata mampu menjalin kerjasama yang kuat dengan negara ketiga sebagai pasar alternatif.

Tanner dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor politik secara historis lebih memiliki dampak yang lebih besar untuk mempengaruhi

⁴¹ Murray Scot Tanner, *Chinese Economic Coercion against Taiwan: A Tricky Weapon to Use* (Pittsburgh: RAND Corporation, 2007), 20.

efektivitas sanksi ekonomi karena faktor ekonomi kurang mampu memberikan garis yang jelas (*red lines*) yang mampu menentukan efektivitas sanksi. Adapun faktor-faktor politik tersebut adalah

1. hubungan historis antara negara-negara pengirim dan target,
2. sifat dan tujuan atau tuntutan yang dicari oleh negara pengirim, dan kapasitas politik negara target untuk mematuhi tujuan atau tuntutan tersebut,
3. keseimbangan kekuasaan domestik dan tingkat kesatuan politik dari negara target dan pengirim,
4. dukungan internasional.⁴²

Dari kedua faktor yang dipaparkan, secara garis besar Tanner menyatakan bahwa kapasitas politik dan kehendak (*will*) negara target untuk bertahan merupakan faktor yang paling menentukan dalam menentukan efektivitas sanksi ekonomi.⁴³ Hal ini berkaitan dengan reaksi yang akan dilakukan oleh negara target setelah dijatuhkan sanksi, yakni apakah akan mencoba melakukan kompromi atau menolak tuntutan untuk mengubah kebijakan dan berusaha untuk mempertahankan keamanan nasionalnya.

Kapasitas target untuk menolak pengenaan sanksi akan berkaitan dengan keseimbangan kekuasaan politik domestik dan tingkat kesatuan politik dalam target. Untuk secara efektif menolak tekanan sanksi ekonomi, maka pemerintah target perlu memobilisasi dukungan masyarakat dan elit atas keputusan mereka

⁴² Ibid., 103.

⁴³ Ibid., 28.

serta pengorbanan jangka pendek (atau mungkin jangka panjang) yang perlu dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok konstituen utama mereka. Oleh karena itu, pengenaan sanksi akan menjadi tidak efektif apabila negara target mampu menentukan langkah-langkah untuk mendapat dukungan dalam negeri atas kerugian yang mungkin mereka dapat sebagai akibat dari keputusan pemerintah untuk melawan pengenaan sanksi ekonomi tersebut.⁴⁴

Bila Tanner menjelaskan bagaimana reaksi negara target melalui reaksi berdasarkan faktor politik dan ekonomi yang mampu mempengaruhi keefektifan pengenaan sanksi, maka Margaret P. Doxey dan Johan Galtung memaparkan mengenai langkah dan cara yang dapat dilakukan oleh negara target untuk menanggulangi kerugian dan tetap mempertahankan keadaan perekonomian nasional akibat penerapan sanksi.

Doxey ikut memberikan pemaparan mengenai kemungkinan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh negara target dalam mereaksi pengenaan sanksi. Dalam semua kasus yang diteliti, Doxey menyatakan bahwa reaksi dari negara target selalu negatif, mereka akan melakukan upaya-upaya atau reaksi untuk melakukan penolakan atau menghindari dampak yang merugikan bagi perekonomian domestik yang membuat sanksi ekonomi menjadi tidak berlaku efektif.⁴⁵

Dalam bukunya, Doxey menjabarkan upaya-upaya tersebut dengan pilihan untuk melakukan beberapa langkah. Pertama, negara target mampu

⁴⁴ Ibid., 29.

⁴⁵ Margaret P. Doxey, *Economic Sanctions and International Enforcement*, edisi kedua (London: MacMillan Press Ltd., 1980), 106.

melakukan tindakan antisipatif. Tindakan antisipatif yang umumnya dilakukan oleh negara target adalah penimbunan (*stockpiling*), mencari sumber alternatif untuk suplai (*alternative sources of supply*), stimulasi dan diversifikasi produksi dalam negeri, pengendalian sumber daya yang langka dan strategis (*control of scare and strategic resources*), dan pengembangan industri pengganti.

Reaksi kedua yang dapat dilakukan oleh negara target adalah mempertahankan keadaan ekonomi nasional atau disebut dengan reaksi defensif. Reaksi ini mampu hadir apabila sanksi dikenakan pada negara yang memiliki prestise dan kebutuhan untuk tetap mempertahankan citra. Langkah-langkah adaptif tersebut kemudian kembali dibagi atas tiga cara, yaitu dengan meningkatkan swasembada, mengurangi ketergantungan pada dunia luar, dan membuka jalan baru pada negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam sanksi yang dikenakan.

Menurut Doxey, apabila embargo yang berlaku bagi target berjalan efektif, maka target akan menghilangkan akses dalam mendapatkan produk terkait. Hal ini dilakukan sebagai tujuan untuk menstimulus pertumbuhan industri domestik. Selain itu, kompensasi akan diberikan bagi kelompok-kelompok yang mengalami kerugian signifikan sebelum akhirnya diberikan merata bagi kelompok-kelompok terkait yang mengalami gangguan akibat sanksi.⁴⁶

Ketiga, jika sanksi tidak dikenakan secara multilateral, maka target mampu bergantung pada negara ketiga yang tidak terlibat dalam pengenaan

⁴⁶ Ibid., 94.

sanksi. Reaksi ini akan memudahkan target apabila negara tujuan memiliki kedekatan secara geografis atau kemampuan ekonomi sehingga dapat memberikan bantuan. Doxey dalam bukunya menyatakan bahwa keadaan ini tidak selalu terjadi pada peristiwa-peristiwa penjatuhan sanksi, tetapi apabila dukungan dari pihak non-sanksi hadir, maka mampu membuat target mempertahankan posisi ekonominya atau bahkan berperan dalam penghindaran sanksi (*sanctions evasion*).

Penghindaran sanksi, sebagai pilihan reaksi keempat, termasuk ke dalam reaksi yang diidentifikasi oleh Doxey, khususnya adalah dengan menggunakan cara ilegal yaitu penyelundupan. Perantara (*middlemen*) berperan penting bagi target untuk tetap melakukan aktivitas ekspor atau memperoleh produk impor melalui cara yang rahasia, sehingga tidak ada pihak manapun yang mengetahui aktivitas tersebut.

Doxey melihat bahwa masih terdapat cara lain yang dapat dilakukan dalam mempertahankan posisi target, yaitu di mana pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan positif berupa pembalasan sanksi. Reaksi ini akan menjadikan target dan pengirim berada pada potensi mendapat kerugian yang sama. Selain melakukan memberikan sanksi dengan porsi yang sama, target juga mampu memilih untuk menggunakan sanksi balasan dalam bidang keuangan. Penolakan akan pembayaran hutang merupakan cara sederhana yang mampu dilakukan untuk melakukan penyerangan balik, dan di saat yang sama, mampu menghindarkan diri dari kewajiban yang memberatkan.

Opini dan moral masyarakat turut menjadi perhatian Doxey. Reaksi keenam ini menjadi penting akibat asumsi bahwa kelompok oposisi mampu tercipta apabila suatu langkah kolektif yang diambil akan bersinggungan dengan lingkup internasional. Sehingga pemerintah mampu menjaga kepercayaan publik bahwa perubahan kebijakan merupakan langkah untuk menghadapi tekanan eksternal semata. Target juga perlu memperhatikan moral masyarakat, khususnya ketersediaan mereka untuk berkorban dan beradaptasi dengan kondisi yang dialami sebagai akibat dari penerapan sanksi.

Penggunaan propaganda merupakan reaksi terakhir yang dipaparkan Doxey, di mana cara ini memiliki korelasi dengan reaksi untuk mempertahankan opini dan moral masyarakat.⁴⁷ Propaganda mampu digunakan untuk mempertahankan dukungan masyarakat, serta mengarahkan opini masyarakat dunia bahwa mereka telah berdiri di jalan yang benar dan merupakan korban dari sebuah tindakan yang tidak adil.

Selain memilih jalur diplomatik, target mampu menyelenggarakan kampanye propaganda melalui layanan informasi pemerintah, meningkatkan aktivitas dan kegiatan yang mengikut sertakan kelompok dan masyarakat dengan tujuan untuk memberi pemahaman mengenai penyebab dari situasi yang dihadapi, dan menggunakan sektor periklanan serta media komunikasi lainnya. Target akan semakin meningkatkan porsinya untuk menggunakan propaganda apabila paket penyelesaian yang ditawarkan pemerintah tidak berdasar pada kebijakan yang sudah hadir sebelumnya.

⁴⁷ Ibid., 123.

Johan Galtung dalam *On the Effect of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia* memaparkan tiga tindakan strategis yang dapat dilakukan negara target sebagai reaksi dari penggunaan sanksi.⁴⁸ Pertama, negara target memilih untuk beradaptasi dengan keadaan, yaitu dengan tidak menggunakan komoditas yang masuk dalam daftar sanksi. Adaptasi negara target akan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin negara untuk menentukan nasib rakyatnya. Di mana pada permulaannya, proses adaptasi ini akan diterima oleh masyarakat seiring dengan berjalannya waktu.

Kedua, negara target akan melakukan restrukturisasi perekonomian nasional. Sehingga opsi yang dapat dilakukan untuk tetap mendapat keuntungan ekonomi walaupun berada dalam kondisi penerapan sanksi adalah dengan memanfaatkan industri lokal untuk memproduksi komoditas impor dari negara pengirim atau mencoba untuk mensubstitusi kebutuhan.

Ketiga, negara akan membuka dan menjalin hubungan dagang dengan atau melalui pihak ketiga. Jika sanksi diberlakukan secara universal, negara target akan melakukan penyelundupan barang melalui pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena target akan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerima ekspor dan pemasok impor.⁴⁹

⁴⁸ Galtung, *On the Effects of International Economic Sanctions*, 387.

⁴⁹ *Ibid.*, 413.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Metode kualitatif digunakan karena penulis bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan berformat “bagaimana”,⁵⁰ di mana hal tersebut sehubungan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis. Serta menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berupaya menggambarkan suatu situasi, di mana masalah terjadi dengan sedetail mungkin, kemudian masalah dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang terdapat dalam kerangka pemikiran.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi tidak langsung melalui buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal, dan situs-situs internet yang dianggap penting dan dapat berguna serta relevan dengan penelitian yang dilakukan.⁵¹

⁵⁰ Robert E. Stake, *Qualitative Research: Studying How Things Work* (New York: The Guilford Press, 2010), 14.

⁵¹ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, edisi ketiga (New York: The Free Press, 1982), 37.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dalam penulisan ini akan terdiri dari lima bagian. Bab I akan dideskripsikan Pendahuluan yang berkaitan dengan sanksi sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang banyak digunakan sebagai reaksi suatu negara atas tindakan negara lain yang dianggap memberi ancaman.

Pada Bab II akan dijabarkan mengenai kependudukan Rusia di Krimea, dengan memaparkan sejarah singkat hubungan Rusia – Ukraina, munculnya revolusi Maidan sebagai momentum untuk memisahkan diri dari Ukraina, dan langkah-langkah yang digunakan Rusia untuk kembali mendapatkan posisinya di Krimea.

Pada Bab III akan dijabarkan mengenai UE sebagai aktor regional, hubungan UE – Rusia, dan penerapan sanksi oleh UE sebagai akibat dari tindakan aneksasi ilegal pada Krimea, serta sanksi balasan Rusia sebagai bentuk reaksi kepada UE.

Pada Bab IV akan dideskripsikan tentang reaksi-reaksi yang dilakukan oleh UE sebagai target atas sanksi balasan yang diterapkan oleh Rusia yang dianggap telah mengganggu kestabilan pasar domestik dan hilangnya mitra dagang strategis.

Pada Bab V berupa kesimpulan penulis mengenai reaksi UE terhadap sanksi balasan Rusia atas aneksasi Krimea sejauh yang telah dilakukan.